



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

BERITA ACARA REKONSILIASI

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 236/PMK.05/2011
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 63/PMK.05/2010 TENTANG MEKANISME
PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN ATAS BEA
MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH

Pada hari ini tanggal bulan tahun..... telah diselenggarakan rekonsiliasi 3 (tiga) pihak antara:

1. KPA atas pendapatan BM-DTP yang dalam hal ini dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang berkewajiban menyampaikan laporan realisasi pendapatan beserta dokumen sumber berupa SSPCP yang diproses dengan menggunakan Aplikasi SAI.
2. KPA atas belanja subsidi BM-DTP yang dalam hal ini dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal..... yang berkewajiban menyampaikan laporan realisasi belanja beserta dokumen sumber berupa SPM/SP2D yang diproses dengan menggunakan Aplikasi SA-BSBL.
3. Kuasa Bendahara Umum Negara yang menyediakan data transaksi dan Laporan Realisasi Anggaran berdasarkan data penerimaan perpajakan, SPM, dan SP2D yang diproses berdasarkan Sistem Akuntansi Umum (SAU).

Rekonsiliasi dilaksanakan secara bersama-sama untuk periode pelaporan triwulan.....tahun anggaran.....dengan melakukan proses pencocokan data dan diperoleh hasil sebagai berikut:

1. DIPA

Jumlah Estimasi Pendapatan berdasarkan SAI (dalam rupiah)

Jumlah Alokasi Belanja BM-DTP berdasarkan SA-BSBL.....(dalam rupiah)

2. LRA

Jumlah LRA Pendapatan berdasarkan SAI (dalam rupiah)

Jumlah LRA Belanja BM-DTP berdasarkan SA-BSBL.....(dalam rupiah)

Dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	DJBC Selaku KPA Pendapatan BM- DTP	Kuasa BUN	Ditjen Selaku KPA Belanja Subsidi BM-DTP
Pendapatan			
Belanja Subsidi			

yang secara rinci tertuang dalam Lampiran Berita Acara Rekonsiliasi. Lampiran dimaksud merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Berita Acara Rekonsiliasi (BAR) ini.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Perbedaan data yang tertuang dalam BAR dan Lampiran BAR, menjadi dasar dilakukannya perbaikan atau dipergunakan sebagai dasar untuk penjelasan atas data dan laporan keuangan masing-masing pihak.

Demikian berita acara ini dibuat untuk dilaksanakan.

Jakarta, tanggal bulan tahun

DJBC	DJPBN/Kuasa BUN	Direktorat Jenderal
ttd	ttd	ttd
Nama :	Nama :	Nama :
NIP :	NIP :	NIP :

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BUREAU UMUM
u.p.
KEPALA BAGIAN TUJUH KEMENTERIAN

Ar
GIARTO
NIP. 195904201984021001



MENTERI KEUANGAN,
ttd,

AGUS D.W. MARTOWARDOJO



MENTERI KEUANGAN
 REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
 PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH SATUAN KERJA MELALUI KPPN DAN/ATAU BUN
 UNTUK BULAN YANG BERAKHIR XX-XXXXXXX-XXXX
 (DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN / LEMBAGA : (015) KEUANGAN
 ESELON I : (05) DITJEN BEA DAN CUKAI
 WILAYAH/PROPINSI : (0100) DKI JAKARTA
 SATUAN KERJA : XXXXXX KANTOR XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
 JENIS SATUAN KERJA : (KP) KANTOR PUSAT

KODE LAP : XXXXXX
 TANGGAL : XX/XX/XXXX
 HAL : XX
 PROG ID :

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN			% REAL PEND.
			JUMLAH SAMPAI DENGAN BULAN LALU	BULAN INI	JUMLAH SAMPAI DENGAN BULAN INI	
1	2	3	4	5	6	7
XX	TRANSAKSI KAS					
XXX	Penerimaan Dalam Negeri					
XXXX	Penerimaan Perpajakan					
XXXXX	Pendapatan Pajak Perdagangan Internasional					
XXXXXX	Pendapatan Bea Masuk	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	99.99
XXXXXXX	Pendapatan Bea Masuk	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	99.99
XXXXXXXX	Uraian Mata Anggaran	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	99.99
	Jumlah Pendapatan XXXXX	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	99.99
	Jumlah Pendapatan XXXX	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	99.99
	Jumlah Pendapatan XXX	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	99.99
	Jumlah Pendapatan Pajak	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	99.99



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

XX	Pendapatan Negara Bukan Pajak					
XXX	Pendapatan Sumber Daya Alam					
XXXX	Pendapatan Minyak Bumi					
XXXXXX	Pendapatan Minyak Bumi					
XXXXXXXX	Uraian Mata Anggaran					
	Jumlah Pendapatan XXXXX			999,999,999,999	999,999,999,999	99.99
	Jumlah Pendapatan XXXX			999,999,999,999	999,999,999,999	99.99
	Jumlah Pendapatan XXX			999,999,999,999	999,999,999,999	99.99
	Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak			999,999,999,999	999,999,999,999	99.99
XX	Pendapatan Hibah					
XXX	Pendapatan Hibah					
XXXX	Pendapatan Hibah Dalam Negeri					
XXXXXX	Pendapatan Hibah Dalam Negeri					
XXXXXXXX	Uraian Mata Anggaran					
	Jumlah Pendapatan XXXXX			999,999,999,999	999,999,999,999	99.99
	Jumlah Pendapatan XXXX			999,999,999,999	999,999,999,999	99.99
	Jumlah Pendapatan XXX			999,999,999,999	999,999,999,999	99.99
	Jumlah Pendapatan XX			999,999,999,999	999,999,999,999	99.99
	Jumlah Pendapatan Hibah			999,999,999,999	999,999,999,999	99.99
	JUMLAH PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH			999,999,999,999	999,999,999,999	99.99



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
BELANJA SATUAN KERJA MELALUI KPPN DAN BUN
UNTUK BULAN YANG BERAKHIR XX XXXXXX XXXX
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN LEMBAGA : (999) BENDAHARA UMUM NEGARA
ESELON I : (07) BELANJA SUBSIDI
WILAYAH/PROPINSI : (0100) DKI JAKARTA
SATUAN KERJA : XXXXXX KANTOR XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
JENIS SATUAN KERJA : (KP) KANTOR PUSAT

KODE LAP. : XXXXXX
TANGGAL : XX/XX/XXXX
HALAMAN : XX
PROG. ID : XXXXXXXXXXXX

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REAL. ANGG.	SISA ANGGARAN
				JUMLAH SAMPAI DENGAN BULAN LALU	BULAN INI	JUMLAH SAMPAI DENGAN BULAN INI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	TRANSAKSI KAS							
XX	Uraian Sumber Dana							
X	Uraian Cara penarikan							
XX	Uraian Fungsi							
XX	Uraian Sub Fungsi							
XX	Uraian Program							
XXXX	Uraian Kegiatan							
XX	Uraian Output							
XX	Uraian Jenis Belanja							
XXXX	Uraian Kelompok Belanja							
XXXXXX	Uraian MA/akun	999,999,999	999,999,999	999,999,999	999,999,999	999,999,999	999,999,999	999,999,999
XXXXXX	Uraian MA/akun	999,999,999	999,999,999	999,999,999	999,999,999	999,999,999	999,999,999	999,999,999
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA	999,999,999	999,999,999	999,999,999	999,999,999	999,999,999	999,999,999	999,999,999
	XXXX							



MENTERI KEUANGAN
 REPUBLIK INDONESIA

KEMENTERIAN KEUANGAN RI
 DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
 KANWIL : XX PROVINSI XXXXXXXX

SISTEM AKUNTANSI KAS UMUM NEGARA
 LAPORAN ARUS KAS TINGKAT KUASA BUN
 PERIODE SAMPAI DENGAN dd-mm-yyyy

Kd Lap : LAKP3B
 Tanggal : dd-mm-yy
 Halaman : xx

KPPN : XXXXXXXX

URAIAN	BULAN INI	S.D. BULAN INI
1	2	3
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI		
ARUS KAS MASUK		
PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH	999.999.999	999.999.999
Penerimaan Perpajakan	999.999.999	999.999.999
411 Pendapatan Pajak Dalam Negeri	999.999.999	999.999.999
412 Pendapatan Pajak Perdagangan Internasional	999.999.999	999.999.999
Penerimaan Negara Bukan Pajak	999.999.999	999.999.999
421 Penerimaan Sumber Daya Alam	999.999.999	999.999.999
422 Pendapatan Bagian Laba Bumh	999.999.999	999.999.999
423 Pendapatan PNBP Lainnya	999.999.999	999.999.999
Penerimaan Hibah	999.999.999	999.999.999
431 Pendapatan Hibah Dalam Negeri dan Luar Negeri	999.999.999	999.999.999
JUMLAH ARUS KAS MASUK	999.999.999	999.999.999
ARUS KAS KELUAR		
BELANJA NEGARA	999.999.999	999.999.999
Belanja Pegawai	999.999.999	999.999.999
511 Belanja Gaji Dan Tunjangan	999.999.999	999.999.999
512 Belanja Honorarium/Lembur/Vakasi/Tunj. Khusus Dan Pegawai Transito	999.999.999	999.999.999
513 Belanja Kontribusi Sosial	999.999.999	999.999.999
Belanja Barang	999.999.999	999.999.999
521 Belanja Barang	999.999.999	999.999.999
522 Belanja Jasa	999.999.999	999.999.999
523 Belanja Pemeliharaan	999.999.999	999.999.999
524 Belanja Perjalanan Dinas	999.999.999	999.999.999
525 Belanja Badan Layanan Umum	999.999.999	999.999.999
526 Belanja Barang Untuk Diserahkan Kpd Masy./Pemda	999.999.999	999.999.999
Belanja Pembayaran Kewajiban Utang	999.999.999	999.999.999
541 Belanja Pembayaran Bunga Utang	999.999.999	999.999.999
542 Belanja Pembayaran <i>Discount</i> SUN Dalam Negeri	999.999.999	999.999.999
543 Belanja Pembayaran <i>Discount</i> SUN Luar Negeri	999.999.999	999.999.999
544 Belanja Pembayaran <i>Loss On Bond Redemption</i>	999.999.999	999.999.999
545 Belanja Pembayaran <i>Discount</i> Surat Berharga Syariah Negara Dalam Negeri	999.999.999	999.999.999
546 Belanja Pembayaran <i>Discount</i> Surat Berharga Syariah Negara Luar Negeri	999.999.999	999.999.999
547 Belanja Denda	999.999.999	999.999.999
548 Belanja Pembayaran Kewajiban/Utang	999.999.999	999.999.999
Belanja Subsidi	999.999.999	999.999.999
551 Belanja Subsidi Perusahaan Negara	999.999.999	999.999.999
552 Belanja Subsidi Perusahaan Swasta	999.999.999	999.999.999
Belanja Hibah	999.999.999	999.999.999
561 Belanja Hibah Kepada Pemerintah Luar Negeri	999.999.999	999.999.999
562 Belanja Hibah Kepada Organisasi Internasional	999.999.999	999.999.999
563 Hibah Kepada Pemerintah Daerah	999.999.999	999.999.999
Belanja Bantuan Sosial	999.999.999	999.999.999
571 Belanja Bantuan Kompensasi Sosial	999.999.999	999.999.999
572 Belanja Bantuan Sosial Lembaga Pendidikan Dan Peribadatan	999.999.999	999.999.999
573 Belanja Lembaga Sosial Lainnya	999.999.999	999.999.999



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

URAIAN	BULAN INI	S.D. BULAN INI
1	2	3
Belanja Lain-Lain	999.999.999	999.999.999
581 Belanja Lain-Lain	999.999.999	999.999.999
JUMLAH ARUS KAS KELUAR	999.999.999	999.999.999
ARUS BERSIH DARI AKTIVITAS OPERASI	999.999.999	999.999.999
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI NON KEUANGAN		
ARUS KAS MASUK		
PENJUALAN ASET	999.999.999	999.999.999
Penjualan Aset	999.999.999	999.999.999
423 Penjualan Aset Tetap	999.999.999	999.999.999
JUMLAH ARUS KAS MASUK	999.999.999	999.999.999
ARUS KAS KELUAR		
BELANJA NEGARA	999.999.999	999.999.999
BELANJA MODAL	999.999.999	999.999.999
Belanja Modal Tanah	999.999.999	999.999.999
532 Belanja Modal Peralatan Dan Mesin	999.999.999	999.999.999
533 Belanja Modal Gedung Dan Bangunan	999.999.999	999.999.999
534 Belanja Modal Jalan, Irigasi, Dan Jaringan	999.999.999	999.999.999
536 Belanja Modal Fisik Lainnya	999.999.999	999.999.999
537 Belanja Modal Badan Layanan Umum	999.999.999	999.999.999
JUMLAH ARUS KAS KELUAR	999.999.999	999.999.999
ARUS BERSIH DARI AKTIVITAS INVESTASI NON KEUANGAN	999.999.999	999.999.999
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PEMBIAYAAN		
ARUS KAS MASUK		
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	999.999.999	999.999.999
Penerimaan Pembiayaan	999.999.999	999.999.999
711 Penerimaan Pembiayaan Dalam Negeri	999.999.999	999.999.999
712 Penerimaan Pembiayaan Luar Negeri	999.999.999	999.999.999
713 Penerimaan Dari Penjadualan Kembali Pokok Utang Luar Negeri	999.999.999	999.999.999
714 Penerimaan Dari Penjadualan Kembali Pokok Utang Dalam Negeri	999.999.999	999.999.999
715 Penerimaan Cicilan Pengembalian Penerusan Pinjaman	999.999.999	999.999.999
716 Penerimaan Pembiayaan Lain-Lain	999.999.999	999.999.999
JUMLAH ARUS KAS MASUK	999.999.999	999.999.999
ARUS KAS KELUAR		
PENGELUARAN PEMBIAYAAN	999.999.999	999.999.999
Pengeluaran Pembiayaan	999.999.999	999.999.999
721 Pengeluaran Pembiayaan Dalam Negeri	999.999.999	999.999.999
722 Pengeluaran Pembiayaan Luar Negeri	999.999.999	999.999.999
723 Pelunasan Pokok Utang Luar Negeri Melalui Penjadualan Kembali	999.999.999	999.999.999
724 Pernyataan Modal Negara	999.999.999	999.999.999
725 RDI/RPD	999.999.999	999.999.999
726 Dukungan Infrastruktur	999.999.999	999.999.999
727 Investasi Pemerintah	999.999.999	999.999.999
728 Pengeluaran Pembiayaan Lain-Lain	999.999.999	999.999.999
JUMLAH ARUS KAS KELUAR	999.999.999	999.999.999
ARUS BERSIH DARI AKTIVITAS PEMBIAYAAN	999.999.999	999.999.999
ARUS KAS DARI AKTIVITAS NON ANGGARAN		
ARUS KAS MASUK		
NON ANGGARAN	999.999.999	999.999.999
Penerimaan Non Anggaran	999.999.999	999.999.999
811 Penerimaan Non Anggaran PFK	999.999.999	999.999.999
812 Penerimaan Wesel Pemerintah	999.999.999	999.999.999
813 Penerimaan <i>Reimbursement</i> Dalam Rangka <i>Prefinancing</i> (PP) dan PFK BUN Lainnya	999.999.999	999.999.999



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

URAIAN	BULAN INI	S.D. BULAN INI
1	2	3
814 Penerimaan Kiriman Uang	999.999.999	999.999.999
815 Penerimaan Transito	999.999.999	999.999.999
816 Koreksi Pengeluaran Pemindahbukuan	999.999.999	999.999.999
817 Penerimaan Non Anggaran Pihak Ketiga	999.999.999	999.999.999
JUMLAH ARUS KAS MASUK	999.999.999	999.999.999
ARUS KAS KELUAR		
NON ANGGARAN	999.999.999	999.999.999
Pengeluaran Non Anggaran	999.999.999	999.999.999
821 Pengeluaran Non Anggaran PFK	999.999.999	999.999.999
822 Pelunasan Wesel Pemerintah	999.999.999	999.999.999
823 Pembayaran PFK <i>Prefinancing</i> dan PFK BUN Lainnya	999.999.999	999.999.999
824 Pengeluaran Kiriman Uang	999.999.999	999.999.999
825 Pengeluaran Transito	999.999.999	999.999.999
826 Koreksi Penerimaan Pemindahbukuan	999.999.999	999.999.999
827 Pengeluaran Non Anggaran Pihak Ketiga	999.999.999	999.999.999
JUMLAH ARUS KAS KELUAR	999.999.999	999.999.999
ARJS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS NON ANGGARAN	999.999.999	999.999.999
KENAIKAN (PENURUNAN) KAS SEBELUM KOREKSI PEMBUKUAN	999.999.999	999.999.999
AKUMULASI KOREKSI PEMBUKUAN	999.999.999	999.999.999
KENAIKAN (PENURUNAN) KAS SETELAH KOREKSI PEMBUKUAN	999.999.999	999.999.999
SALDO AWAL KAS	999.999.999	999.999.999
SALDO AKHIR KAS	999.999.999	999.999.999
SALDO AKHIR KAS BLU	999.999.999	999.999.999
SALDO KAS LAINNYA DI KL DARI HIBAH	999.999.999	999.999.999
SALDO AKHIR KAS KPPN	999.999.999	999.999.999

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO UMUM

u.b.

KEPALA BAKOSAN T.U. KEMENTERIAN

Ar
GIARTO
NIP. 195904201984021001



MENTERI KEUANGAN,

ttd,

AGUS D.W. MARTOWARDOJO